



**BAPPEDA
LITBANG**
KABUPATEN BOGOR

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

**Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah**



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta program Asta Cita melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menjamin terciptanya sinkronisasi perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan di tingkat Perangkat Daerah, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);

31. Peraturan ...

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 9);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 14);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 11);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Rencana ...

15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
25. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
26. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.

27. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
28. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
29. Subkegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan *output* langsung.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya perubahan Renja PD Tahun 2025 adalah untuk menjamin terciptanya konsistensi perencanaan dan penganggaran tingkat PD dalam perubahan perencanaan pembangunan tahun 2025.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya perubahan Renja PD Tahun 2025 adalah:

- a. mengevaluasi realisasi pencapaian target kegiatan, subkegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi oleh PD selama 1 (satu) triwulan;
- b. mengintegrasikan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana yang tercantum dalam perubahan RKPD Tahun 2025 ke dalam perubahan Renja PD Tahun 2025; dan
- c. mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah, untuk semester II (dua).

Pasal 4

Perubahan Renja PD Tahun 2025 berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi penyelenggaraan kinerja PD berdasarkan urusan kewenangan pemerintahan daerah Tahun 2025 pasca perubahan;
- b. acuan pengendalian dan evaluasi internal PD pasca perubahan; dan
- c. acuan bagi penyusunan Renja PD tahun berikutnya.

BAB III
KEDUDUKAN DAN MUATAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD Tahun 2025 merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun perubahan perencanaan pembangunan tahun 2025 sesuai kewenangan bidang urusannya.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025.
- (3) Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I (satu) tahun berkenaan.
- (4) Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025.

Bagian Kedua
Muatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 6

Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memuat:

- a. kegiatan sebelum dan sesudah perubahan;
- b. subkegiatan sebelum dan sesudah perubahan;
- c. target kinerja sebelum dan sesudah perubahan;
- d. pagu anggaran sebelum dan sesudah perubahan; dan
- e. lokasi dan kelompok sasaran sebelum dan sesudah perubahan.

Pasal 7

Isi beserta uraian Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ...

BAB IV

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Seluruh data program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan kinerja yang menjadi substansi perubahan Renja PD Tahun 2025 tercantum dalam SIPD.
- (2) Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perubahan Renja PD Tahun 2025.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 13 Juni 2025



Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 13 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



ASAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2025 NOMOR 14

DAFTAR ISI

BAB I..... 2

PENDAHULUAN 2

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Landasan Hukum.....8

1.3 Maksud Dan Tujuan.....14

1.4 Sistematika Penulisan 15

BAB II..... 17

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025..... 17

2.1 Evaluasi Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.....17

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor 20

BAB III..... 43

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG 43

BAB IV 81

PENUTUP 81

LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 14 TAHUN 2025

TANGGAL : 13 JUNI 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025, dilakukan penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja PD. Khususnya Perubahan Renja PD Tahun 2025, memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam Renstra PD Tahun 2025-2029, yang secara simultan terkoordinasi dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada substansi dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang disusun dengan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah, yaitu:

- a. Pemenuhan anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- b. Mendorong percepatan pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- c. Melaksanakan program prioritas pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2025 sesuai dengan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2025-2029;

- 
- 
- d. Melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat;
 - e. Alokasi anggaran diprioritaskan pada belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan;
 - f. Pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan, belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga; dan
 - g. Kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam.

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 mengakomodir adanya perubahan-perubahan penambahan dan/atau pengurangan rincian subkegiatan akibat adanya perubahan target kinerja dan anggaran yang terjadi sejak ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2025 hingga pergeseran-pergeseran yang dilakukan dan tercantum dalam Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memedomani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 yang memperlihatkan sejauh mana pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan, kemungkinan terlaksana atau tidak terlaksana, serta terselesaikan atau tidak terselesaikan pada akhir tahun 2025.

A. Pengertian ringkas tentang Renja PD Tahun 2025 dan alasan perubahannya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD Tahun 2025 merupakan perencanaan tahun kedua untuk periode perencanaan jangka menengah sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2023. Selanjutnya, pada Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sementara, pada Pasal 11 Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, disebutkan pula bahwa perubahan RKPD tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:

- (1) Kebutuhan daerah dalam rangka peleyanan dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD tahun 2025.

Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:

- (a) Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
- (b) Dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
- (c) Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
- (d) Dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya, belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil (outcome) program.

Disebutkan pula pada Bab IV Pasal 6 Peraturan Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 bahwa:

- (1) Renja PD Tahun 2025 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - (a) Terjadi perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan bidang urusan;
 - (b) Terjadi perubahan nomenklatur PD/kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja PD; dan
 - (c) Terjadi perubahan pada rincian belanja yang mendukung pencapaian target kinerja.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

B. Proses Penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Bogor

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor 2025 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2025 dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, juga masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025. Rancangan perubahan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor maupun program dan kegiatan prioritas pada Akhir Perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan Perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, maka Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 selanjutnya menjadi dasar perumusan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025.

C. Keterkaitan antara Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dengan dokumen Perubahan RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Dokumen Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Dokumen Perubahan RKPD, evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja pada tahun berkenaan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

Perubahan Renja PD ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja PD menjadi pedoman PD dalam menyusun perubahan RKA SKPD dan isi perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.

D. Keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor sebagai salah satu dokumen perencanaan Pembangunan tahunan di lingkup perangkat daerah yang merupakan penyesuaian dari penjabaran Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang berisi Perencanaan Pembangunan jangka waktu lima tahunan yang telah disusun sebelumnya.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang dijabarkan melalui proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang sistematis dan terpadu maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

E. Keterkaitan antara Perubahan Renja dengan Renja Kementerian / Lembaga, dan Renja Provinsi Jabar.

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 telah melalui proses penyusunan dan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor khususnya tim penyusun Dokumen Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Hal ini guna meningkatkan peran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta konsistensi terhadap Perencanaan Pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada sisa Tahun 2025 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

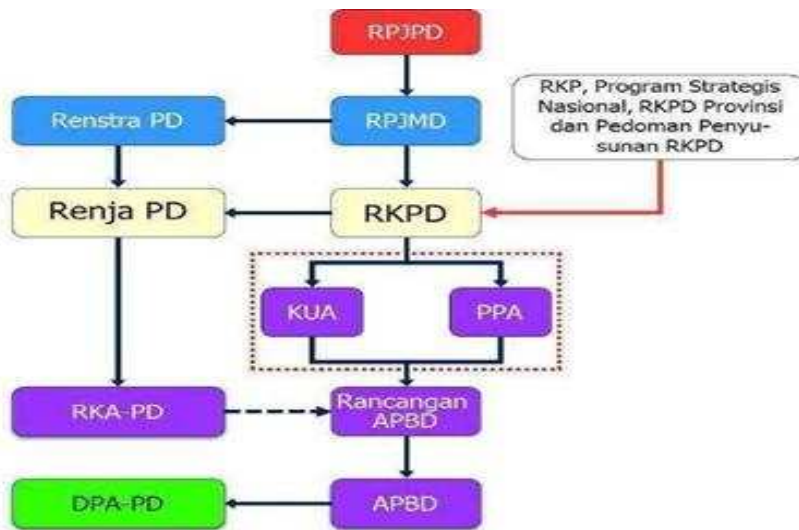
Selanjutnya dari sisi dinamika penyerengaraan Pemerintah Daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target Perubahan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada Tahun 2025. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah Kabupaten Bogor yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan perubahan atas Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Bogor.

F. Tindak lanjut Perubahan Renja PD dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

Tindak lanjut penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025, dapat digambarkan seperti alur di bawah ini :

Gambar 1.1

Tindak Lanjut Perubahan Renja dengan Proses Penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2024



Adapun perubahan yang dilakukan pada perubahan Renja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dan proses penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025 diantaranya adalah :

- Adanya efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025;
- Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
- Penambahan Substansi Kajian pada Sub kegiatan Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset;
- Adanya perubahan kode rekening belanja yang tidak sesuai; serta
- Perubahan perencanaan strategis lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

- 
- 
- Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- 
- 
- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran

- 
- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 462);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
 41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun

- 2005-2025;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11);
 46. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
 47. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 48. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044;
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2);
 51. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 14);
 52. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
 53. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 58 Tahun 2024 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;
 54. Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang)

Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah :

Maksud disusunnya Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka Penyusunan bahan Perubahan APBD Tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi panduan dalam perumusan perubahan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah Tahun 2025;
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2025;
3. Menjadi panduan penyusunan rincian belanja dalam tahapan KUPA-PPASP, Perubahan RKA dan Perubahan RAPBD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2025

Bab ini berisi uraian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR.



Berisi uraian tentang perubahan usulan dan revisi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan. Dan kebutuhan anggaran sebelum dan sesudah perubahan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan hal-hal penting yang dianggap penting untuk menjadi perhatian pada penyusunan Perubahan Renja Tahap selanjutnya.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja pelayanan Bappedalitbang terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024-2026 seiring dengan ditetapkannya P-RPD Tahun 2024-2026 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Bappedalitbang sampai dengan triwulan II Tahun 2025 terhadap capaian Renstra dan Renja untuk tahun berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada Tahun 2025.

Indikator Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, telah ditetapkan dengan proyeksi perhitungan pencapaian Tujuan dengan Indikator Tujuan dapat dicapai dengan 2 (dua) sasaran strategis yang terdapat tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur dalam pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung pencapaian IKU Bupati yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi. Evaluasi terhadap capaian Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 telah dilakukan, dimana capaian kinerja pelayanan Bappedalitbang Tahun 2025 sebagai tahun terakhir pelaksanaan Renstra Bappedalitbang 2024-2026, belum dapat diukur secara maksimal disebabkan kegiatan belum selesai peksanaanya. Adapun hasil evaluasi sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1. di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan TRIWULAN II Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target RENSTRA Tahun 2025	Realisasi sampai dengan Triwulan II/ Semester I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	$6 = \frac{5}{4} \times 100$	7
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas	NILAI SAKIP	Poin	41.34	-	-	
1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efisien, Efektif dan berdampak Positif ke masyarakat	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin	23.91	-	-	
1.2	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin	17.43	-	-	
1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85.50	-	-	
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	-	-	
2.1	Hasil riset dan inovasi yang bermanfaat	Kebijakan hasil riset yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kebijakan	1	-	-	
		Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	-	-	

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 pada Triwulan II dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Restra) maupun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 dengan realisasi pencapaiannya.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa target Indikator Kinerja pada **Tujuan 1**, yaitu **“Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas”** dengan penetapan dan penentuan target pada tahun 2025 yaitu 41,43 Poin, dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap Nilai Komponen perencanaan dan pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP. Namun sampai Triwulan II belum ada realisasi kinerja atau 0%. Hal ini dikarenakan capaian kinerja pada Sasaran I baru akan dapat diukur di akhir tahun anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Selanjutnya target indikator kinerja Tujuan 1, pada **Sasaran 1** yaitu **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efisien, Efektif dan berdampak Positif ke masyarakat”** dengan penetapan dan penentuan target sebesar 23,91 Poin, dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada komponen SAKIP. Namun sampai Triwulan II belum ada realisasi kinerja atau 0%. Hal ini dikarenakan capaian kinerja pada Sasaran I baru akan dapat diukur di akhir tahun anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Selanjutnya target indikator kinerja Tujuan 1, pada **Sasaran 1**, yaitu **“Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah”** dengan penetapan target untuk Tahun 2025 sebesar 17,43 Poin, sampai Triwulan II capaian realisasi kinerja masih 0%. Persentase tersebut merupakan perbandingan antara realisasi dari penyusunan kajian/hasil penelitian dari target yang ditetapkan yang dilaksanakan Bappedalitbang Kabupaten Bogor Tahun 2025. Sedangkan pada indikator kinerja Tujuan 1, **Sasaran 3** yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah”**, ditetapkan Tahun 2025 sebesar 85,50 Poin dan sampai Triwulan II belum ada capaian realisasi atau 0%, karena baru akan dapat diukur di akhir tahun anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pada **Tujuan 2** yaitu **“Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas”** dengan penetapan target pada tahun 2025 dengan nilai Predikat Indeks Inovasi Daerah **Sangat Inovatif**. Realisasi jumlah inovasi di Kabupaten Bogor diatas bukan hanya berdasarkan kuantitas inovasi (jumlah inovasi), tetapi juga kualitas inovasi (tingkat kematangan inovasi) yang dihasilkan oleh berbagai stakeholder di Kabupaten Bogor. Tingkat kematangan inovasi diukur berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu ide orisinalitas, implementasi produk inovasi, kemanfaatan (sosial, ekonomi, lingkungan hidup),

dampak sosial dan lingkungan hidup, serta berbasis potensi wilayah. Penetapan indikator tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil riset sebelumnya dan standar pengukuran Indeks Inovasi Daerah dari Kemendagri RI.

1.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan

Dalam penyelenggaraan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Program/Kegiatan, antar lain;

- a. Berdasarkan hasil Realisasi IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor belum dapat tergambarkan dikarenakan jadwal Agenda Perencanaan Pembangunan baru dapat terukur pada semester 2.
- b. Masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan teknis Sistem Perencanaan dan Penganggaran.
- c. Perlu adanya penanganan permasalahan strategis di Kabupaten Bogor.

1.1.2 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran

- a. Peningkatan kapasitas SDM Perencana;
- b. Optimalisasi koordinasi dengan pusat;
- c. Adanya penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Strategis terkait dengan kajian pada bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Bogor dicapai dengan melaksanakan seluruh program yang diamanatkan P-RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Bogor kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor, termasuk dalam amanat tersebut adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang urusan yang dilimpahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

Indikator kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Bogor tertuang pada sasaran pembangunan dalam Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (outcome) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan.

Berikut disajikan Evaluasi terhadap Hasil Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Periode Pelaksanaan Triwulan II tahun 2025 pada Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sampai Dengan TRIWULAN II Tahun 2025

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket	
								Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.			
1					2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
5																												
5	01																											
5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten/K ota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	Predikat	49,892,379,314	BB	Predikat	26,773,181,877	BB	Predikat	26,501,844,795	-	Predikat	10,584,316,350	-	16.34	-	4,331,128,927	-	16.34	Kepala Badan	-	
					Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Bappedalitbang	Predikat	BB	Predikat	1,257,609,882	BB	Predikat	418,483,500	BB	Predikat	528,948,760	-	Predikat	187,652,000	-	10.96	-	57,987,000	-	10.96	Sekretaris Badan	-	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	Dokumen	506,372,398	8	Dokumen	118,684,675	8	Dokumen	247,793,302	-	Dokumen	141,152,000	-	20	-	48,987,000	-	20	Katim Program dan pelaporan	-	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	Dokumen	67,185,048	1	Dokumen	18,309,000	1	Dokumen	32,317,624	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Katim Program dan pelaporan	-	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	1	Dokumen	47,174,177	1	Dokumen	17,354,000	1	Dokumen	21,891,283	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Katim Program dan pelaporan	-	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	1	Dokumen	65,374,824	1	Dokumen	20,609,000	1	Dokumen	22,588,640	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Katim Program dan pelaporan	-	

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket
								Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.		
1					2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	Dokumen	44,184,108	12	Dokumen	7,233,070	1	Dokumen	25,262,407	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Keuangan	-
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Laporan	40,196,966	1	Laporan	22,695,500	1	Laporan	22,982,746	-	Laporan	3,931,750	-	17	-	3,931,750	-	17	Kasubag Keuangan	-
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	Laporan	201,870,621	18	Laporan	25,682,400	2	Laporan	104,850,183	-	Laporan	31,309,100	-	19	-	19,445,100	-	19	Kasubag Keuangan	-
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	%	100	%	77,661,964	6	%	29,944,760	100	%	29,944,760	-	%	14,794,580	-	20.51	-	6,143,000	-	20.51	Sekretaris Badan	-
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	Dokumen	27,284,498	4	Dokumen	7,224,700	2	Dokumen	8,040,342	-	Dokumen	5,103,080	-	33	-	2,661,000	-	33	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	Dokumen	22,002,499	1	Dokumen	8,764,400	1	Dokumen	5,680,934	-	Dokumen	2,699,500	-	44	-	2,512,000	-	44	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	Laporan	28,374,968	1	Laporan	7,233,500	4	Laporan	16,223,484	-	Laporan	6,992,000	-	6	-	970,000	-	6	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket
				Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	% 1,059,706,618	100	%	709,212,180	100	%	468,172,980	-	%	227,766,100	-	26.41	-	123,662,250	-	26.41	Sekretaris Badan	-
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	160	Unit 49,220,534	-	Unit	-	160	Unit	28,142,553	-	Unit	11,996,000	-	8	-	2,007,000	-	8	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	Paket 214,316,608	-	Paket	-	3	Paket	63,261,120	-	Paket	16,755,850	-	11	-	4,484,000	-	11	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	Dokumen 49,993,212	-	Dokumen	-	12	Dokumen	25,113,779	-	Dokumen	46,914,650	-	5	-	5,614,650	-	5	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	Dokumen 58,846,309	12	Dokumen	15,400,100	12	Dokumen	34,746,698	-	Dokumen	2,547,400	-	1	-	428,400	-	1	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	Dokumen 182,971,278	12	Dokumen	48,012,500	12	Dokumen	39,123,665	-	Dokumen	122,680,200	-	63	-	86,885,200	-	63	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	Orang 80,622,537	105	Orang	123,335,100	10	Orang	103,390,305	-	Orang	26,872,000	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	135	Orang 60,910,825	135	Orang	15,162,900	135	Orang	36,304,877	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket
								Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.		
1					2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	27	Orang	362,825,316	110	Orang	507,301,580	27	Orang	138,089,983	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan sarana operasional perangkat daerah sesuai kebutuhan	%	100	%	3,835,921,999	10	%	1,955,680,227	100	%	1,357,991,418	-	%	426,251,121	-	12.95	-	175,855,621	-	12.95	Sekretaris Badan	-
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	Paket	152,392,525	8	Paket	115,577,000	4	Paket	133,700,198	-	Paket	59,822,000	-	25	-	33,398,000	-	25	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	Paket	326,360,042	15	Paket	716,885,000	2	Paket	152,217,630	-	Paket	149,100,000	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	Paket	747,792,969	4	Paket	148,666,500	5	Paket	130,364,897	-	Paket	60,884,000	-	31	-	40,167,000	-	31	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	Paket	1,095,869,342	4	Paket	88,414,600	12	Paket	105,981,620	-	Paket	22,185,000	-	12	-	12,870,000	-	12	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	Paket	270,061,620	3	Paket	162,349,800	4	Paket	150,538,854	-	Paket	37,350,000	-	25	-	37,350,000	-	25	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	Laporan	285,587,664	7350	Laporan	57,330,000	12	Laporan	49,500,000	-	Laporan	10,260,000	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	450	Laporan	787,760,460	509	Laporan	505,934,877	450	Laporan	549,776,712	-	Laporan	76,309,921	-	8	-	44,342,421	-	8	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Penatausahaa n Arsip	Jumlah Dokumen Penatausahaan	Dokumen	12	Dokumen	49,352,939	12	Dokumen	24,027,000	12	Dokumen	22,207,548	-	Dokumen	6,917,000	-	19	-	4,305,000	-	19	Kasubag Umum dan	-

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket
								Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.		
1					2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					Dinamis pada SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD																				Kepegawai an	
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	Dokumen	120,744,437	1	Dokumen	136,495,450	1	Dokumen	63,703,959	-	Dokumen	3,423,200	-	5	-	3,423,200	-	5	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengelolaan barang milik daerah unsur penunjang perangkat daerah	%	100	%	3,199,296,796	5	%	900,965,000	100	%	1,240,114,967	-	%	127,800,000	-	10.31	-	127,800,000	-	10.31	Sekretaris Badan	-
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	56	Unit	1,204,726,415	-	Unit	-	56	Unit	54,798,480	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	Unit	1,136,854,063	-	Unit	-	2	Unit	638,960,400	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	Unit	551,039,914	-	Unit	-	12	Unit	298,836,854	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	Unit	69,673,801	13	Unit	188,160,000	1	Unit	2,972,025	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	Unit	80,535,156	3	Unit	712,805,000	4	Unit	132,027,840	11	Unit	127,800,000	11	97	11	127,800,000	11	97	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket
								Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.		
1					2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11	Unit	156,467,448	-	Unit	-	11	Unit	112,519,368	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan	%	100	%	3,922,868,836	3	%	1,867,624,280	100	%	1,883,972,556	-	%	863,035,205	-	-	-	408,959,134	-	-	Sekretaris Badan	-
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	560	Laporan	17,916,119	800	Laporan	5,600,000	560	Laporan	5,600,000	560	Laporan	5,600,000	560	100	560	5,600,000	560	100	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Laporan	1,561,251,550	4	Laporan	782,982,830	12	Laporan	822,249,520	3	Laporan	362,539,746	3	19	3	153,404,316	3	19	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	Laporan	61,216,093	0	Laporan	-	1	Laporan	12,793,860	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Laporan	2,282,485,074	12	Laporan	1,079,041,450	12	Laporan	1,043,329,176	-	Laporan	494,895,459	12	24	12	249,954,818	12	24	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	100	%	3,392,471,268	6	%	3,477,382,436	100	%	2,625,564,364	-	%	57,211,043	-	0.83	-	21,920,000	-	0.83	Sekretaris Badan	-

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket
								Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.		
1					2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	25	Unit	459,630,043	25	Unit	235,517,606	25	Unit	212,541,300	-	Unit	18,781,043	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	Unit	52,354,883	0	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	122	Unit	217,387,233	129	Unit		122	Unit	130,602,600	-	Unit	21,920,000	-	17	-	21,920,000	-	17	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Unit	3	Unit	2,255,197,400	3	Unit	2,956,879,330	3	Unit	2,191,034,164	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Unit	54	Unit	301,747,275	60	Unit	38,911,700	54	Unit	66,211,500	-	Unit	16,510,000	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Unit	1	Unit	106,154,434	2	Unit	246,073,800	1	Unit	25,174,800	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawai an	-
					PROGRAM PERENCANA AN, PENGENDAL IAN DAN EVALUASI PEMBANGU NAN DAERAH	Nilai Pemanfaatan Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	Skala	4	Skala	8,214,633,007	4	Skala	3,237,358,351	4	Skala	4,130,069,791	-	Skala	690,892,454	-	5.56	-	229,504,282	-	5.56	Kepala Badan	-

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket
				Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Skala	5	Skala	5,101,446,037	5	Skala	2,394,111,916	5	Skala	2,215,816,815	-	Skala	563,908,410	-	6.93	-	153,524,356	-	6.93	Kepala Bidang Perencana an Pengendali an dan Evaluasi	-
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan , dan Isu Strategis Pembanguna n Daerah	Dokumen	3	Dokumen	874,503,125	2	Dokumen	585,724,300	3	Dokumen	91,588,649	-	Dokumen	40,393,900	-	9	-	8,226,400	-	9	Ketua Tim Perencana an dan Pendanaan	-
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen	2	Dokumen	1,026,261,475	6	Dokumen	474,651,268	2	Dokumen	480,850,135	-	Dokumen	120,329,880	-	10	-	47,702,328	-	10	Ketua Tim Perencana an dan Pendanaan	-
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara	2	Berita Acara	139,920,500	1	Berita Acara	37,170,500	2	Berita Acara	62,871,399	-	Berita Acara	5,017,800	-	6	-	4,082,800	-	6	Ketua Tim Perencana an dan Pendanaan	-
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	Berita Acara	174,900,625	72	Berita Acara	48,455,500	1	Berita Acara	43,516,040	-	Berita Acara	23,544,900	-	54	-	23,544,900	-	54	Ketua Tim Perencana an dan Pendanaan	-
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Ko ta	Berita Acara	2	Berita Acara	1,049,403,750	2	Berita Acara	453,811,234	2	Berita Acara	878,893,828	-	Berita Acara	266,210,000	-	-	-	-	-	-	Ketua Tim Perencana an dan Pendanaan	-
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Usulan	40	Usulan	437,251,563	990	Usulan	147,371,300	40	Usulan	138,331,650	-	Usulan	72,962,000	-	43	-	58,959,000	-	43	Ketua Tim Perencana an dan Pendanaan	-

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket
								Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.		
1					2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Dokumen	3	Dokumen	1,399,205,000	4	Dokumen	646,927,814	3	Dokumen	519,765,114	-	Dokumen	35,449,930	-	3.7	-	19,235,328	-	3.7	Ketua Tim Perencana an dan Pendanaan	-
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembanguna n Daerah	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	%		%	1,623,857,759	100	%	341,918,025		%	1,477,413,707	-	%	13,896,250	-	0.67	-	9,900,250	-	0.67	Kepala Bidang Perencana an Pengendali an dan Evaluasi	-
					Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembanguna n Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	4	Dokumen	1,049,403,750		Dokumen		4	Dokumen	1,186,483,388	-	Dokumen	6,300,500	-	0.19	-	2,304,500	-	0.19	Ketua Tim Data dan Informasi	-
					Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	600	Orang	574,454,009	554	Orang	341,918,025	600	Orang	290,930,319	-	Orang	7,595,750	-	2.61	-	7,595,750	-	2.61	Ketua Tim Data dan Informasi	-
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembanguna n Daerah	Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah	%	40	%	880,979,211		%	317,146,626	40	%	267,419,776	-	%	62,976,966	-	10.87	-	29,066,512	-	10.87	Kepala Bidang Perencana an Pengendali an dan Evaluasi	-

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket
								Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.		
1					2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembanguna n Daerah di Kabupaten/Ko ta	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	Laporan	367,074,647	2	Laporan	248,394,826	2	Laporan	191,387,869	-	Laporan	49,444,776	-	12	-	22,544,272	-	12	Ketua Tim Pengendali an, Evaluasi dan Pelaporan	-
					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembanguna n Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	Laporan	513,904,563	2	Laporan	68,751,800	2	Laporan	76,031,907	-	Laporan	13,532,190	-	9	-	6,522,240	-	9	Ketua Tim Pengendali an, Evaluasi dan Pelaporan	-
					Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembanguna n Daerah	Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data Pada SIPD	%	60	%	608,350,000	100	%	184,181,784	60	%	169,419,493	-	%	50,110,828	-	21.85	-	37,013,164	-	21.85	Kepala Bidang Perencana an Pengendali an dan Evaluasi	-
					Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembanguna n Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	2	Dokumen	699,602,500	3	Dokumen	184,181,784	2	Dokumen	169,419,493	-	Dokumen	50,110,828	-	21.85	-	37,013,164	-	21.85	Ketua Tim Data dan Informasi	-

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket
								Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.		
1					2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISA SI PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAERAH	Nilai Pemanfaatan Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), dan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Skala	4	Skala	12,489,057,479	4	Skala	9,598,078,785	4	Skala	11,947,785,773	-	Skala	962,436,527	-	3.25	-	388,701,704	-	3.25	Kepala Badan	-
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembanguna n Manusia	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Skala	5	Skala	4,066,439,531	5	Skala	2,127,924,134	5	Skala	2,588,036,291	-	Skala	387,071,536	-	4.99	-	129,056,656	-	4.99	Kepala Bidang Pemerintah an dan Pembangu nan Manunsia	-
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pemerintahan (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	Dokumen	480,976,719	4	Dokumen	349,795,821	3	Dokumen	205,723,012	-	Dokumen	41,875,328	-	14	-	28,547,664	-	14	Ketua Tim Perencana an dan Monitoring Evaluasi Bidang Pemerintah an	-
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	3	Laporan	306,076,094	3	Laporan	29,616,000	3	Laporan	57,313,168	-	Laporan	28,334,000	-	39	-	22,514,000	-	39	Ketua Tim Perencana an dan Monitoring Evaluasi Bidang Pemerintah an	-

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket
								Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.		
1					2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	5	Laporan	174,900,625	5	Laporan	34,373,000	5	Laporan	107,629,845	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	Ketua Tim Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Bidang Pemerintahan	-
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	3	Laporan	480,976,719	3	Laporan	100,846,500	3	Laporan	185,104,070	-	Laporan	25,170,000	-	1	-	2,390,000	-	1	Ketua Tim Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	Dokumen	480,976,719	4	Dokumen	1,020,759,634	3	Dokumen	912,509,876	-	Dokumen	56,080,052	-	3	-	28,541,664	-	3	Ketua Tim Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia	-
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	Laporan	306,076,094	3	Laporan	34,911,000	3	Laporan	112,902,302	-	Laporan	39,788,328	-	22	-	24,350,664	-	22	Ketua Tim Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia	-

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket
								Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.		
1					2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	5	Laporan	743,327,656	5	Laporan	75,165,784	5	Laporan	137,429,093	-	Laporan	34,207,328	-	7	-	9,617,664	-	7	Ketua Tim Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia	-
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	Laporan	1,093,128,906	3	Laporan	482,456,395	4	Laporan	869,424,925	-	Laporan	161,616,500	-	2	-	13,095,000	-	2	Ketua Tim Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Skala	5	Skala	2,650,897,323	5	Skala	1,765,878,065	5	Skala	1,272,520,747	-	Skala	244,220,484	-	10.63	-	135,302,992	-	10.63	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	Dokumen	503,047,705	4	Dokumen	270,464,342	3	Dokumen	136,693,027	-	Dokumen	61,213,828	-	24	-	32,273,664	-	24	Ketua Tim Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian	-

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket
								Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.		
1					2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	3	Laporan	82,012,785	5	Laporan	57,239,900	3	Laporan	45,967,048	-	Laporan	22,186,500	-	42	-	19,484,000	-	42	Ketua Tim Perencana an dan Monitoring Evaluasi Pembangu nan Bidang Perekonom ian	-
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	Laporan	162,482,765	5	Laporan	43,995,500	5	Laporan	60,168,229	-	Laporan	17,850,000	-	25	-	15,075,000	-	25	Ketua Tim Perencana an dan Monitoring Evaluasi Pembangu nan Bidang Perekonom ian	-
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	5	Laporan	874,938,393	2	Laporan	1,036,176,655	5	Laporan	512,275,577	-	Laporan	27,535,500	-	-	-	-	-	-	Ketua Tim Sinergitas dan Harmonisa si Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Perekonom ian dan Sumber Daya Alam	-
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang SDA (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	Dokumen	364,667,803	3	Dokumen	221,613,768	8	Dokumen	280,814,994	-	Dokumen	56,331,328	-	9	-	24,647,664	-	9	Ketua Tim Perencana an dan Monitoring Evaluasi Pembangu nan Bidang Sumber Daya Alam	-
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Laporan	4	Laporan	228,245,316	3	Laporan	61,947,400	4	Laporan	82,877,412	-	Laporan	22,795,500	-	24	-	19,543,000	-	24	Ketua Tim Perencana an dan Monitoring Evaluasi Pembangu nan Bidang	-

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket
				Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
																						Sumber Daya Alam	
																						Ketua Tim Perencana an dan Monitoring Evaluasi Pembangu nan Bidang Sumber Daya Alam	-
																						Ketua Tim Sinergitas dan Harmonisa si Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Perekonom ian dan Sumber Daya Alam	-
																						Kepala Bidang Infrastrukt ur dan Pengemba ngan Wilayah	-
																						Tim Perencana an dan Monitoring Evaluasi Pembangu nan Bidang Infrastrukt ur	-

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket
								Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.		
1					2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	Laporan	437,251,563	4	Laporan	35,700,000	1	Laporan	245,500,826	-	Laporan	33,978,795	-	6	-	15,122,000	-	6	Tim Perencana an dan Monitoring Evaluasi Pembangu nan Bidang Infrastrukt r	-
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	Laporan	87,450,313	4	Laporan	45,668,500	1	Laporan	100,387,445	-	Laporan	12,330,500	-	4	-	3,711,000	-	4	Tim Perencana an dan Monitoring Evaluasi Pembangu nan Bidang Infrastrukt r	-
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	5	Laporan	1,049,403,750	3	Laporan	1,356,341,200	5	Laporan	4,474,582,111	-	Laporan	83,852,500	-	-	-	6,860,000	-	-	Ketua Tim Sinergitas dan Harmonisa si Perencana an Pembangu nan Bidang Infrastrukt r dan Kewilayaha n	-
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Kewilayahan (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	Dokumen	1,066,893,813	4	Dokumen	174,429,109	3	Dokumen	510,189,917	-	Dokumen	2,520,000	-	-	-	2,520,000	-	-	Tim Perencana an dan Monitoring Evaluasi Pembangu nan Bidang Kewilayaha n	-
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	3	Laporan	699,602,500	1	Laporan	63,453,784	3	Laporan	65,406,092	-	Laporan	23,767,328	-	18	-	11,557,664	-	18	Tim Perencana an dan Monitoring Evaluasi Pembangu nan Bidang Kewilayaha n	-

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket
								Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.		
1					2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	Laporan	769,562,750	4	Laporan	49,914,884	1	Laporan	70,210,309	-	Laporan	30,043,328	-	29	-	20,425,664	-	29	Tim Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Bidang Kewilayahana	-
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	2	Laporan	961,953,438	2	Laporan	2,674,462,175	2	Laporan	949,746,652	-	Laporan	98,687,728	-	3	-	33,169,064	-	3	Ketua Tim Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahana	-
					PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan	Kebijakan	1	Kebijakan	5,950,928,977	-	Kebijakan	-	1	Kebijakan	2,736,720,658	-	Kebijakan	151,996,288	-		-	115,300,828	-		Kepala Badan	-
						Predikat hasil inovasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraa n Pemerintah Daerah	Predikat	Sanga t Inovat if	Predikat			Predikat		Sangat Inovatif	Predikat			Predikat									-
					Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase bahan kebijakan perencanaan, penelitian, pengmbangan, pengkajian dan penerapan	%	11.11	%	3,854,413,945	-	%	-	11.11	%	1,771,890,757		%	41,430,828	-	2	-	30,913,164	-	2	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah	-
						Karya tulis ilmiah terindeks global lainnya yang terpublish	%		%			%			%			%								-	
						karya tulis ilmiah terindeks global yang terdaftar	%		%			%			%			%								-	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket
				Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Naskah	9	Naskah	3,854,413,945	-	Naskah	-	9	Naskah	1,771,890,757	-	Naskah	41,430,828	-	2	-	30,913,164	-	2	Ketua Tim Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-
		Invensi dan Inovasi	Predikat	Sangat Inovatif	Predikat	2,096,515,032	-	Predikat	-	Sangat Inovatif	Predikat	964,829,901	-	Predikat	110,565,460	-	9	-	84,387,664	-	9	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah	-
		Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Laporan	1	Laporan	382,638,636	-	Laporan	-	1	Laporan	184,390,882	-	Laporan	61,817,828	-	27	-	50,644,664	-	27	Ketua Tim Invensi dan Inovasi	-
		Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Laporan	1	Laporan	217,634,903	-	Laporan	-	1	Laporan	121,471,387	-	Laporan	3,968,000	-	3	-	3,968,000	-	3	Ketua Tim Invensi dan Inovasi	-
		Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Laporan	1	Laporan	110,352,951	-	Laporan	-	1	Laporan	43,961,284	-	Laporan	9,878,000	-	22	-	9,878,000	-	22	Ketua Tim Invensi dan Inovasi	-
		Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Laporan	1	Laporan	204,632,127	-	Laporan	-	1	Laporan	73,277,852	-	Laporan	9,240,000	-	13	-	9,240,000	-	13	Ketua Tim Invensi dan Inovasi	-

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renja sampai dengan Semester I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sd Tahun 2025 (%)		Penanggu ng Jawab	Ket
								Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	S	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.	Volume	Rp.		
1					2	3	4	5			6			7			8			9		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Laporan	2	Laporan	90,947,799	-	Laporan	-	2	Laporan	34,044,271	-	Laporan	17,010,912	-	10	-	3,319,000	-	10	Ketua Tim Inovasi dan Inovasi	-
					Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Laporan	2	Laporan	323,565,952	-	Laporan	-	2	Laporan	119,957,375	-	Laporan	5,083,360	-	4	-	4,533,000	-	4	Ketua Tim Inovasi dan Inovasi	-
					Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan	1	Laporan	766,742,665	-	Laporan	-	1	Laporan	387,726,850	-	Laporan	3,567,360	-	1	-	2,805,000	-	1	Ketua Tim Inovasi dan Inovasi	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Bogor sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berjalan dengan cukup baik sesuai target. Dari total 4 Program, 19 kegiatan dan 92 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) sebesar Rp.39.865.157.835,- (Tiga puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), baru terealisasi sebesar Rp.7.251.132.081,- (Tujuh Milyar Dua Puluh Lima Satu Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 8,49 % dengan nilai rata-rata capaian kinerja outcome sebesar 14,22 % dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan indikator kinerja program (outcome) : Nilai pemanfaatan perencanaan kinerja perangkat daerah dan Nilai pemanfaatan pengukuran kinerja dengan target sebesar Skala 4. Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.4.130.069.791,- (Empat milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Puluh Sembilan ribu Tujuh ratus Sembilan Puluh Satu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 229.504.282,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan juta Lima Ratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan puluh Dua Rupiah) atau 5,56%. Capaian kinerja outcome masih rendah dikarenakan output kegiatan baru akan terealisasi di akhir tahun anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan indikator kinerja Program (outcome) : Nilai pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM, PSDA, IPW dan Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM, PSDA, IPW, dengan target sebesar Skala 4. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.11.947.785.773,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 388.701.704,- atau 3,25 %. Capaian kinerja outcome masih rendah dikarenakan output kegiatan baru terealisasi di akhir tahun anggran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3. Program Riset dan Inovasi Daerah, dengan indicator Jumlah Rekomendasi Kebijakan berbasis Riset dan Inovasi dengan capaian program (outcome) sebesar 1 Kabijakan dan Predikakt Hasil Inoavsi yang menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan capaian program Sangat Inovatif. Program ini dilaksakan melalui 2 (Dua) kegiatan dan 8 (Delapan) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.2.736.720.658,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ratus Lima

Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 115.300.828,- (Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau 3,14%. Capaian kinerja outcome masih rendah dikarenakan output baru dapat teralisasi di akhir tahun anggran sesuai target yang telah ditetapkan.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah kinerja program (outcome) dengan predikat BB. Program ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 48 (empat puluh Delapan) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.26.501.884.795,- (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.4.331.128.927,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Satu Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau 16,34%. Capaian kinerja outcome masih rendah dikarenakan output kegiatan akan terealisasi di akhir tahun anggran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG

Penyusunan Perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Struktur APBD Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 wajib mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mengacu kepada Perubahan RKPD Tahun 2025. Serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Adapun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan anggaran yang terjadi dalam perubahan penjabaran APBD Tahun anggaran 2025 berdasarkan inpres Nomor 1 Tahun 2025;
2. Menyesuaikan kinerja, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah sebagai bentuk penyesuaian terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk tahun 2025;
3. Menyesuaikan Program prioritas sudah terkoneksi baik dari Program, Kegiatan dan Sub kegiatan konkrit sudah terpetakan dengan lokus, anggaran dan tahun pelaksanaan;

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 tetap mempunyai 4 Program, 19 Kegiatan dan 92 Sub Kegiatan dengan rincian yang dituangkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
					Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	BB	BB	26,501,844,795	24,874,759,490	24,874,762,491	24,891,900,582	Bappedali tbgang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	BB	28,526,129,803
	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Bappedaliti bng	Predikat	BB	77.75	BB	528,948,760	374,338,681	374,338,682	452,338,682	Bappedali tbgang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	BB	719,042,532
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	8	247,793,302	165,226,412	165,226,412	243,226,412	Bappedali tbgang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	8	289,520,062
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	32,317,624	22,669,531	22,669,531	22,669,531	Bappedali tbgang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	38,413,269

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	21,891,283	14,631,299	14,631,299	14,631,299	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	26,971,989
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	22,588,640	15,660,047	15,660,047	15,660,047	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	37,378,268
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	18,066,500	11,914,907	11,914,907	11,914,907	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	45,803,269

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	5	33,111,589	22,662,034	22,662,034	22,662,034	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	5	89,785,854
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	5	142,261,297	113,880,926	113,880,927	113,880,926	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	5	180,251,296
					Penyelenggara an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Laporan	1	1	1	10,918,525	7,693,525	7,693,525	7,693,525	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	10,918,525

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
										Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
										Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1						2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang sesuai ketentuan	%	100	100	100	18,367,134,990	18,332,338,710	18,332,338,710	18,332,345,710	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	100	18,951,814,466
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bul an	14	14	14	18,173,168,454	18,173,168,454	18,173,168,454	18,173,175,454	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	14	18,747,277,930
						Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	40,871,200	28,752,220	28,752,220	28,752,220	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	12	40,871,200
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaaa n Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	1	25,262,407	15,550,462	15,550,462	15,550,462	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	25,262,407

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	22,982,746	16,126,276	16,126,276	16,126,276	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	22,982,746
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	Laporan	2	2	2	104,850,183	98,741,298	98,741,298	98,741,298	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	2	115,420,183
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	%	100	100	100	29,944,760	24,076,633	24,076,633	24,076,633	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	100	44,403,480

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	2	8,040,342	5,592,792	5,592,792	5,592,792	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	2	15,600,000
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasa n, dan Pengendali an Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	1	1	5,680,934	5,680,934	5,680,934	5,680,934	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	12,580,000
					Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	4	16,223,484	12,802,907	12,802,907	12,802,907	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	4	16,223,480
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatn ya Pengelolaa n Kepegawaia n Perangkat Daerah	%	100	100	100	468,172,980	414,640,175	413,783,533	333,783,533	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	100	605,890,698

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkata n Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	160	160	160	28,142,553	28,142,553	28,142,553	28,142,553	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	160	28,142,000
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann ya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa n	Paket	3	3	3	63,261,120	24,415,005	23,558,363	23,558,363	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	122,536,216
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	Dokumen	12	12	12	25,113,779	17,238,996	17,238,996	17,238,996	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	12	28,583,781
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaa n Sistem Informasi Kepegawaia n	Dokumen	12	12	12	34,746,698	54,945	54,945	54,945	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	12	33,645,568

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	12	12	39,123,665	29,529,332	29,529,332	29,529,332	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	12	104,614,422
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	10	10	103,390,305	149,540,305	149,540,305	69,540,305	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	10	46,096,197
					Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	135	135	135	36,304,877	27,004,056	27,004,056	27,004,056	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	135	34,825,962
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang- Undangan	Orang	27	27	27	138,089,983	138,714,983	138,714,983	138,714,983	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	27	207,446,552

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan sarana operasional perangkat daerah sesuai kebutuhan	%	100	100	100	1,357,991,418	1,909,127,061	1,882,236,703	1,882,236,703	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	100	2,193,200,853
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	133,700,198	143,458,763	143,458,763	143,458,763	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	4	87,130,921
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	2	152,217,630	811,912,693	809,463,393	809,463,393	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	2	186,597,413
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5	5	130,364,897	303,066,216	278,625,158	278,625,158	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	5	427,553,057
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	105,981,620	143,213,427	143,213,427	143,213,427	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	12	626,566,853

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	Paket	4	4	4	150,538,854	105,215,134	105,215,134	105,215,134	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	4	154,408,608
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	49,500,000	43,902,244	43,902,244	43,902,244	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	12	163,285,674
					Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	450	450	450	549,776,712	289,136,108	289,136,108	289,136,108	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	450	450,404,600
					Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	12	22,207,548	20,518,517	20,518,517	20,518,517	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	12	28,217,703

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	1	63,703,959	48,703,959	48,703,959	48,703,959	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	69,036,024
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengelolaa n barang milik daerah unsur penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	1,240,114,967	868,939,514	868,939,514	868,939,514	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	100	1,829,208,327
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	56	56	56	54,798,480	37,068,228	37,068,228	37,068,228	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	56	688,806,238
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2	2	638,960,400	585,713,700	585,713,700	585,713,700	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	2	650,000,000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	12	12	298,836,854	10,030,616	10,030,616	10,030,616	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	12	315,058,859
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	2,972,025	2,972,025	2,972,025	2,972,025	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	39,836,222
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	4	132,027,840	132,027,840	132,027,840	132,027,840	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	4	46,046,237
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11	11	11	112,519,368	101,127,105	101,127,105	101,127,105	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	11	89,460,771

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah yang sesuai ketentuan	%	100	100	100	1,883,972,556	1,830,537,936	1,858,287,936	1,877,419,027	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	100	2,242,912,989
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	560	560	560	5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	560	10,243,599
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	822,249,520	811,449,520	811,449,520	811,449,520	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	12	892,650,641
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	12,793,860	10,235,088	10,235,088	10,235,088	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	35,000,500

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	1,043,329,176	1,003,253,328	1,031,003,328	1,005,134,419	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	12	1,305,018,249
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	100	100	100	2,625,564,364	1,120,760,780	1,120,760,780	1,120,760,780	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	100	1,939,656,458
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	25	25	25	212,541,300	166,995,000	166,995,000	166,995,000	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	25	262,794,969
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	122	122	122	130,602,600	130,602,600	130,602,600	130,602,600	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	122	124,291,856

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Unit	3	3	3	2,191,034,164	489,210,633	489,210,633	489,210,633	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	1,289,416,433
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Unit	54	54	54	66,211,500	44,955,000	44,955,000	44,955,000	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	54	172,524,984
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Unit	1	1	1	25,174,800	288,997,547	288,997,547	288,997,547	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	60,694,142
					PROGRAM PERENCANA AN, PENGENDALI AN DAN EVALUASI PEMBANGUN AN DAERAH	Nilai Pemanfaat an Perencana an dan Pengukura n Kinerja Pemerintah Daerah	Skala	4	4	4	4,130,069,791	2,734,267,523	2,734,261,173	2,734,261,173	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	4	4,748,916,996

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaa n dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Skala	5	5	5	2,215,816,815	1,458,730,712	1,458,724,362	1,458,724,362	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	5	2,916,768,329
					Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RK PD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	3	3	3	91,588,649	253,812,873	253,812,873	253,812,873	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	500,000,000
					Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah Daerah	Dokumen	2	2	2	480,850,135	463,653,342	463,653,342	463,653,342	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	2	586,768,329
					Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	2	2	62,871,399	36,621,399	36,621,399	36,621,399	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	2	80,000,000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
					Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	1	43,516,040	27,592,939	27,592,939	27,592,939	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	100,000,000
					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kot a	Jumlah Berita Acara Musrenban g Kabupaten/ Kota	Berita Acara	2	2	2	878,893,828	294,061,542	283,312,692	283,312,692	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	2	600,000,000
					Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	40	40	40	138,331,650	115,755,499	115,755,499	115,755,499	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	40	250,000,000
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RP JMD/RKPD)	Dokumen	3	3	3	519,765,114	267,233,118	277,975,618	277,975,618	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	800,000,000

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
										Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
												Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1						2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
						Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	%	100	90	90	1,477,413,707	971,481,428	971,481,428	971,481,428	Bappedalitbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	90	928,445,944
						Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	4	4	2	1,186,483,388	809,506,388	809,506,388	809,506,388	Bappedalitbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	2	600,000,000
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	600	600	600	290,930,319	161,975,040	161,975,040	161,975,040	Bappedalitbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	600	328,445,944

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
										Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
										Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025			Nasional	Daerah			
1						2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah	%	80	40	40	267,419,776	189,849,526	189,849,526	189,849,526	Bappedalibang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	40	503,702,723
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	2	2	191,387,869	145,562,694	145,562,694	145,562,694	Bappedalibang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	2	209,876,121
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	2	2	76,031,907	44,286,832	44,286,832	44,286,832	Bappedalibang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	2	293,826,602
						Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Pengelola Data Pada SIPD	%	100	60	60	169,419,493	114,205,857	114,205,857	114,205,857	Bappedalibang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	60	400,000,000

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
										Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
										Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintah an Daerah di Bidang Pembangun an Daerah Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintah an Daerah di Bidang Pembangun an Daerah yang Dikelola	Dokumen	2	2	2	169,419,493	114,205,857	114,205,857	114,205,857	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	2	400,000,000	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025					Nasional		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISA SI PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAERAH	Nilai Pemanfaata n Perencanaa n dan Pengukuran Kinerja Pembangun an Daerah Lingkup Bidang Pemerintah an dan Pembangun an Manusia, Lingkup Bidang Perekonomi an dan Sumber Daya Alam (SDA), dan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengemban gan Wilayah	Skala	4	4	3	11,947,785,773	9,092,765,083	9,092,771,432	10,375,633,342	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	7,140,659,148

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaa n dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintah an dan Pembangun an Manusia	Skala	5	5	4	2,588,036,291	1,956,982,761	1,956,982,761	1,939,852,377	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	4	2,325,000,000
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah Bidang Pemerintah an yang Dikoordinir Penyusuna nnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	3	205,723,012	128,342,606	128,342,606	111,212,222	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	275,000,000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Pemerintah an	Laporan	3	3	3	57,313,168	48,839,218	48,839,218	48,839,218	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	175,000,000
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Pemerintah an	Laporan	5	5	5	107,629,845	35,814,345	35,814,345	35,814,345	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	5	100,000,000
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Pemerintah an	Laporan	3	3	3	185,104,070	68,741,070	68,741,070	68,741,070	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	275,000,000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah Bidang Pembangun an Manusia yang Dikoordinir Penyusuna nnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	3	912,509,876	835,013,107	835,013,107	835,013,107	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	275,000,000
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Pembangun an Manusia	Laporan	3	3	3	112,902,302	81,323,841	81,323,841	81,323,841	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	175,000,000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Pembangun an Manusia	Laporan	5	5	5	137,429,093	81,689,149	81,689,149	81,689,149	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	5	425,000,000
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Pembangun an Manusia	Laporan	4	4	3	869,424,925	677,219,425	677,219,425	677,219,425	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	625,000,000
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaa n dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomi an dan Sumber	Skala	5	5	4	1,272,520,747	851,384,796	851,391,145	1.551,390,438	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	4	1,515,659,148

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
						Daya Alam (SDA)															
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (JPD, JMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	3	136,693,027	111,302,519	111,302,519	586,302,519	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	287,619,158
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	3	3	3	45,967,048	38,542,048	38,542,048	38,542,048	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	46,891,076

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Perekonomi an	Laporan	5	5	5	60,168,229	41,091,229	41,091,229	41,091,229	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	5	92,900,048
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Perekonomi an	Laporan	5	5	5	512,275,577	299,512,816	299,519,165	299,512,816	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	5	500,248,866
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusuna nnya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	8	3	280,814,994	216,534,145	216,534,145	441,534,145	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	208,500,000

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
					Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	4	3	82,877,412	43,836,235	43,836,235	43,836,235	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	130,500,000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	9	9	5	65,347,800	46,656,075	46,656,075	46,656,075	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	5	66,500,000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang SDA	Laporan	1	1	1	88,376,660	53,909,729	53,909,729	53,909,729	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	182,500,000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaa n dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengemban gan Wilayah	Skala	5	5	4	8,087,228,735	6,284,397,527	6,284,397,527	6,884,390,527	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	4	3,300,000,000
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusuna nnya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	3	1,671,205,383	1,473,795,747	1,473,795,747	1,473,795,747	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	400,000,000
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	3	245,500,826	215,290,327	215,290,327	215,290,327	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	250,000,000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	5	100,387,445	62,147,445	62,147,445	62,147,445	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	5	50,000,000
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	5	5	2	4,474,582,111	3,278,878,111	3,278,878,111	3,278,878,111	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	2	600,000,000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025					Nasional		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (JPD, JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah Bidang Kewilayaha n yang Dikoordinir Penyusuna nnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	3	510,189,917	139,975,415	139,975,415	389,968,415	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	610,000,000
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Kewilayaha n	Laporan	3	3	3	65,406,092	65,036,693	65,036,693	65,036,693	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	400,000,000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Kewilayaha n	Laporan	1	1	1	70,210,309	70,576,673	70,576,673	70,576,673	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	440,000,000
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Kewilayaha n	Laporan	2	2	3	949,746,652	978,697,116	978,697,116	1,328,697,116	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	3	550,000,000
					PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Rekomenda si Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan	Kebijakan	1	1	1	2,736,720,658	3,163,365,738	3,163,362,738	3,963,362,738	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	3,402,462,957

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)	
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	
						Predikat hasil inovasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan penyelengg araan Pemerintah Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif					Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	Sangat Inovatif		
						Penelitian, Pengembang an, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase bahan kebijakan perencanaa n, penelitian, pengmbang an, pengkajian dan penerapan	%	11.11	11.11	14.29	1,771,890,757	2,348,922,826	2,348,922,826	3,148,922,826	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	14.29	2,203,773,683
							Karya tulis ilmiah terindeks global lainnya yang terpublish	%	%	%	%					Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	%	
							karya tulis ilmiah terindeks global yang terdaftar	%	%	%	%					Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	%	

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
										Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
										Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025			Nasional	Daerah			
1						2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
						Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah	9	9	7	1,771,890,757	2,348,922,826	2,348,922,826	3,148,922,826	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	7	2,203,773,683
						Invensi dan Inovasi	Nilai Predikat Invensi dan Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	964,829,901	814,442,912	814,439,912	814,439,912	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	Sangat Inovatif	1,198,689,274
						Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Laporan	1	1	1	184,390,882	102,521,342	102,521,342	102,521,342	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	218,774,882
						Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasiona l	Laporan	1	1	1	121,471,387	100,387,267	100,387,267	100,387,267	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	124,433,462

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
										Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
										Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1						2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaataan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Laporan	1	1	1	43,961,284	28,227,284	28,227,284	28,227,284	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	63,094,658	
					Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Laporan	1	1	1	73,277,852	45,543,410	45,543,410	45,543,410	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	116,999,083	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
					Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat /organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitiaan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Laporan	2	2	1	34,044,271	79,286,627	79,286,627	79,286,627	Bappedalibang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	51,999,699
					Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Laporan	2	2	1	119,957,375	117,235,294	12,235,294	12,235,294	Bappedalibang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	184,999,883

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra 2029	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
									Target 2025 (volume)		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target (volume)	Pagu Indikatif' (Rp)
									Semula	Menjadi	Renja 2025	Perubahan Penjabaran I APBD 2025	Perubahan Penjabaran II APBD 2025	Perubahan Renja 2025				Nasional	Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan	1	1	1	387,726,850	341,241,688	446,238,688	446,238,688	Bappedali tbang	APBD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	SKPD	1	438,387,607
											45,316,421,017	39,865,157,834	39,865,157,834	41,965,157,835							

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 memedomani substansi Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang juga merupakan tahun pertama pencapaian target visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, yang dituangkan sebagai tahun pertama dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2029. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran, perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 disusun dan ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, dokumen Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja sehingga realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan akan sejalan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan bermanfaat, khususnya bagi perencanaan serta penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bogor, dan umumnya bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

BUPATI BOGOR,



RUDY SUSMANTO